

Menghadapi Gelombang Tsunami Kedua:

Studi kasus Rekontruksi Aceh, pasca-Helsinki¹

Oleh George Junus Aditjondro

Abstrak

Tulisan ini secara khusus membahas masalah-masalah yang terkait dengan Aceh. Selain menghadapi kolonialisme Jakarta, Aceh menghadapi masalah tambahan, karena negeri itu harus dibangun kembali setelah diluluhlantkan oleh gempa bumi dan tsunami, yang telah menelan ratusan ribu jiwa. Sementara itu, kesepakatan kemerdekaan Aceh yang lebih dikenal dengan singkatan GAM (Gerakan Aceh Merdeka), dengan pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, Aceh dapat menjadi 'Laboratorium' untuk meneliti apakah semangat untuk merdeka akan pudar, setelah berbagai tuntutan GAM dikabulkan oleh Jakarta. Aceh sekaligus dapat menjadi laboratorium untuk menguji apakah transformasi GAM menjadi partai lokal, yang kemungkinan besar terpilih menjadi pemerintah Aceh yang legal, akan terperangkap dalam bentuk-bentuk korupsi mirip seperti di Aceh sebelum kesepakatan Helsinki. Sebab dalam fase pasca-revolusi, banyak pemimpinn gerakan kemerdekaan berubah menjadi elit baru yang korup, seperti diamati Frantz Fanon (1971) di Afrika.

Hal serupa sudah terulang di Timor Leste, pasca refrendum. Juga di Filipina Selatan, setelah Nur Misuari, mantan pemimpin Front Nasional Pembela Mindanao (MNLF, Mindanao National Liberation Front), diangkat oleh Manila menjadi Gubernur ARMM (Autonomous Region of Muslim Mindanao).

Pengantar

Apakah korupsi menyuburkan semangat untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)? Sejauh ini, saya belum melihat hasil studi yang dapat memberikan jawaban yang meng-ia-kan pertanyaan itu. Yang sering dikemukakan orang Aceh atau orang Papua dalam menjelaskan penolakannya terhadap NKRI- disamping perdebatan soal bentuk negara kesatuan *versus* negara federal adalah ketidakadilan dalam pengelolaa sumber daya alam, seperti dikemukakan oleh anggota Komnas HAM, M.M Billah (2004)¹.

¹ Telah disampaikan sebagai makalah untuk Seminar Sehari Mengenang 100 tahun DR. Johannes Leimena bertema "Menyuburkan kembali Semangat Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan Berbangsa Berdasarkan Pancasila" di

Soalnya, kedua daerah itu merupakan basis operasi dua maskapai tambang transnasional bermodal AS, yakni ExxonMobil di Aceh dan Freeport McMoRan di Papua Barat. Walaupun kedua maskapai tambang transnasional itu merupakan penghasil terbesar di Indonesia, dampak positifnya bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sangat minimal. Bahkan dampak lingkungan PT Arun LNG, perusahaan kongsi ExxonMobil, yang dengan Pertamina dan sejumlah konsumen LNG di Jepang, sangat merugikan petani dan nelayan di sekitar Zona Industri Lhok Seumawe (ZILS) akibat limbah cair dan pipa kondensat yang bocor (lihat Kell 1995: 17-19; Aditjondro 2001).

Dari kedua daerah tersebut diatas, makalah ini secara khusus akan difokuskan pada Aceh, karena dua alasan. Pertama, walaupun sama-sama harus menghadapi kolonialisme Jakarta, Aceh menghadapi masalah tambahan karena negeri itu harus dibangun kembali setelah dilululantakkan oleh gempa bumi dan tsunami, yang telah menelan ratusan ribu jiwa. Kedua, berbeda dengan Papua Barat, kesepakatan damai telah dicapai antara gerakan Kemerdekaan Aceh, yang lebih dikenal dengan singkatan GAM (Gerakan Aceh Merdeka), dengan pemerintah Republik Indonesia.

Kesepakatan itu ditandatangani di Helsinki, tanggal 15 Agustus yang lalu, karena dimediasi oleh mantan presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, lewat lima putaran perundingan antara kedua belah pihak sejak 27 Januari 2005 (Gatra, 27 Agustus 2005; 73 Tempo, 28 Agustus 2005: 46-50).

Dengan demikian, Aceh dapat menjadi 'laboratorium' untuk meneliti apakah semangat untuk merdeka akan pudar, setelah terbagi tuntutan GAM dikabulkan oleh Jakarta. Aceh sekaligus dapat menjadi laboratorium untuk menguji apakah transformasi GAM menjadi portal lokal, yang kemungkinan besar terpilih menjadi pemerintah Aceh yang legal, akan terperangkap dalam bentuk-bentuk korupsi mirip seperti di Aceh sebelum kesepakatan Helsinki. Sebab dalam fase pasca-revolusi banyak pemimpin gerakan kemerdekaan berubah menjadi elit baru yang korup seperti diamati Frantz Fanon (1971) di Afrika. Hal serupa sudah terulang di Timor Leste, pasca referendum (lihat Aditjondro 2004b). Juga di Filipina Selatan, setelah Nur Misuari, mantan pemimpin Front Nasional Pembebasan Mindanoo (MNLF, *Mindano National Liberation front*), diangkat oleh Manila menjadi Gubernur ARMM (*Autonomous Region of Muslim Mindano*).

Tiga lapis korupsi, Tiga Era Korupsi

Berbicara soal korupsi, literatur sosiologi korupsi tidak membatasi konsep korupsi pada soal sogok-menyogok atau pemeras antara pengusaha dan pemangku jabatan publik. Berdasarkan teori Syed Hussein Alatas, William Chambliss dan Milvoan Djilas, kita dapat membedakan tiga lapis korupsi sebagai berikut (lihat Aditjndro 2004a:10).

- a. Korupsi lapis pertama terjadi di bidang sentuh langsung antar warga dan pemangku jabatan publik, yang meliputi suap (*bribery*), di mana prakarsa datang dari pemangku jabatan publik. Jenis korupsi ini yang lazim disorot oleh publik dan mengandung risiko pelanggaran hukum yang paling langsung.
- b. Korupsi lapis kedua, terjadi di aras (lapisan) yang lebih tinggi, terutama di lingkaran kekuasaan, dan terdiri dari *nepotisme*, bila ada hubungan darah diantara mereka yang diangkat memasuki lingkaran kekuasaan, atau diberi kemudahan; *kroni-isme* bila tidak ada hubungan darah diantara yang diangkat atau diberi kemudahan dengan pemangku jabatan public yang bersangkutan; dan ‘kelas baru’ (*new class*) apabila kelompok atau partai yang berkuasa

mengutamakan anggota kelompok atau partainya untuk berbagai kekuasaan. Rezim Soeharto menjalankan ketiga bentuk lapis kedua itu. Jenis korupsi ini biasanya baru berakhir dengan pengertian rezim, walaupun dalam kasus Soeharto belum terbukti. Korupsi lapis kedua ini dapat juga berwujud oligarki, pemerintah oleh sejumlah keluarga dan kelompok kaya, seperti oligarki di Indonesia yang berkaki tiga, yakni istana, tangsi, dan partai penguasa, mulai dari era Soeharto s/d era SBY-MJK (lihat Aditjondro 2005b).

- c. Korupsi lapis ketiga berbentuk jejaring (*cobal*) yang dapat bercakap regional, nasional maupun internasional, dan meliputi unsur birokrat, politisi, pengusaha, aparat penegak hukum dan aparat ideologis yang dapat memberikan legitimasi bagi pemilihan produk tertentu, penerapan program tersebut. Contohnya adalah politik pengendalian penduduk lewat penggunaan alat-alat kontrasepsi produksi negara-negara yang ikut membiayai program “kependudukan” itu. Jenis korupsi yang begini yang paling stabil, karena kepentingan para kapitalis saling tersembunyi karena sudah

diikat dalam hubungan negara peminjam (*creditor*). Korupsi transnasiona semacam ini sering tersembunyi dalam “bahasa pembangunan” dengan terminologi “bantuan”, “donor”, dan sebagainya (lihat Hancock 2005).

Berdasarkan konseptualisasi korupsi yang lebih paripurna, inklusif, dan *electric* begini, secara kornologis kita dapat membedakan tiga jenis korupsi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Pertama, korupsi di bawah jubah militer, sebelum *tsunami*. Kedua, korupsi dibawah jubah kedermawanan, yang berkembang pasca-tsunami. Ketiga, korupsi transnasional dalam pengintegrasian Aceh ke jargingan kapitalisme global yang kini mulai menentukan arah pembangunan Aceh, tanpa melibatkan rakyat Aceh dalam seluruh proses pengambilan keputusan menyangkut sumber daya alam dan masa depan negeri mereka.

A. Korupsi di bawah jubah militer:

Abdullah Puteh, Gubernur NAD, adalah gubernur pertama yang diajukan sebagai tersangka dalam kasus korupsi diatas Rp 1 miliar oleh Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK), hari selasa

29 Juni 2004. Penetapan status tersangka terhadap Puteh ini dilakukan KPK setelah Komisi ini memeriksa Puteh sebanyak dua kali, yakni tanggal 4 Juni dan 10 Juni 2004. Berdasarkan hasil penyelidikan KPK, kerugian negara dalam kasus pengadaan helikopter MI-2 buatan Rusia untuk pemerintah NAD setidaknya Rp 4 miliar. “Helikopter itu dibeli seharga 12 miliar, sedangkan AL [membeli] seharga 6 miliar. Artinya masih ada selisih 6 miliar. Akan tetapi, karena spesifikasinya lebih khusus, yaitu ada anti-peluru dan ber-AC, maka kerugian negara yang baru kami temukan senilai Rp 4 miliar, “kata Erry Riyana Hardjaoamekas, Wakil Ketua KPK (*kompas*, 30 Juni 2004).

Setelah proses yang makan waktu hampir sepuluh bulan, dan setelah mendengar pledoi Puteh setebal 43 halaman yang dibacanya pada hari kamis, 17 Maret lalu, pada tanggal 11 April yang lalu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Abdullah Puteh sepuluh tahun penjara (*Medium*, 23 Maret -5 April 2005: 47-50, 20 April-3 Mei 2005: 18-22; *Tempo*, 24 April 2005: 102-103).

Sesungguhnya, dugaan korupsi sang gubernur tidak terbatas pada *mark up* pembelian helikopter itu saja. Masih ada 49 kasus lain dimana Abdullah Puter diduga juga telah menyalahgunakan

wewenang sebagai gubernur untuk menyelewengkan uang rakyat ke kantongnya sendiri (lihat SAMAK 203). Barangkali, uang rakyat dan wibawanya sebagai gubernur juga yang menjadi modal Abdullah Puteh untuk menjadi pemegang saham dan komisaris PT Woyla Raya Abadi, yang menguasai HGU perkebunan kelapa sawit seluas 6557 hektar di Darul Makmur, Buitong di Aceh Timur (lihat Aditjondro 2004a: 65-6).

Selain itu, pengadilan terhadap Abdullah Puteh menutupi peranan orang-orang dekat penguasa, yang semestinya juga ditampilkan ke depan meja hijau. Yang juga diadili dan divonis bersama Puteh adalah Bram Manoppo, direktur PT Putra Pobiagaan Mandiri, perusahaan yang memasok helikopter itu untuk Pemerintah Provinsi NAD. Namun yang tidak disebut-sebut namanya dalam proses persidangan itu adalah pemilik PT itu, yakni Irzal Chaniago (64), abang ipar Panglima TNI, jenderal Endriartono Sutarto. Chaniago dan partner bisnisnya, Andy Kosasih, mengatur kontak bisnis kotor melalui *shell company* mereka di Singapura, Swifh Air & Industrial Suply Pte. Ltd (lihat Aditjondro 2005b).

Dari situ dapat dilihat bahwa, lepas dari besarnya jumlah dana publik yang diselewengkan, impunitas militer di bidang korupsi ini masih tetap dijaga dan dipelihara. Kalau perlu, dengan

menjadikan pejabat-pejabat sipil, yang sebelumnya dipakai sebagai kolaborator, sebagai tumbal. Seperti Abdullah Puteh dalam bidang korupsi, dan dalam konteks pelanggaran HAM, mantan Gubernur Timor Timur, Jose Abilio Soares.

Padahal sesungguhnya, medan perang di Aceh menjadi ajang ‘perbaikan pendapatan’ yang luar biasa bagi para bintang dan perwira petama TNI dan Polri yang bertugas di Aceh, serta bagi para perwira tinggi yang menentukan anggaran militer di Jakarta. Yang jelas, peran antara GAM dan TNI di Aceh, menguntungkan para prajurit karena keterlibatan mereka dalam perdagangan dua jenis komoditi yang bersifat ilegal, yakni ganja hasil produksi Aceh dan senjata serta amunisi produksi PT Pindad di Bandung. Banyak tentara dan polisi yang bertugas di Aceh terlibat dalam perdagangan ganja ke Jakarta (lihat Ishak 2004). Pasukan Kopasus yang mulai bertugas di Aceh tahun 1990, mengutip rente 10% dari perdagangan gelap ganja, terutama di Aceh yang terbesar. Makanya timbul pemeo di kalangan aktivis Aceh, bahwa tentara yang datang dengan menyundang M-16, pulang membawa 16 M. Maksudnya, 16 miliar rupiah (lihat Aditjondro 2001: xx). Sebaliknya, dari arah yang berlawanan sejumlah prajurit terlibat dalam penjualan senjata dan asumsi buatan Pindad kepada

para gerilyawan GAM (Ishak 2004: 73-4, 76, 78).

Kehadiran gerilyawan bersenjata di Aceh di masa lalu, juga membawa keuntungan material bagi tentara dan polisi, dalam bentuk “uang keamanan” (*protection fee*) dari ExxonMobil. Dalam wawancaranya dengan *Tempo Interaktif*, 21 November 2000 Aguswandi, Koordinator KONTRAS Aceh waktu itu, mengungkapkan besarnya *protection fee* itu. Di situ dibebaskan bagaimana ExxonMobil mengeluarkan hampir lima miliar rupiah tiap bulan untuk dana operasional tentara dan polisi yang bertugas di Aceh. Dana itu meliputi uang saku besar Rp 40 ribu per prajuri tiap hari, fasilitas transportasi, kantor, pos, barak, radio, telepon, mess dan lainn. Setidaknya ada 17 pos TNI dan polri yang dibiayai oleh ExxonMobil dengan jumlah personil seribu orang dari berbagai kesatuan (lihat Aditjondro 2001: xxv).

B. Korupsi di balik jubah kedermawanan

Cobalah kita lihat apa yang sedang terjadi di Aceh, pasca tsunami. Belum lagi kering air mata rakyat Aceh atas kematian sanak saudara, tetangga dan sahabat mereka, maskapai-maskapai domestik sudah bermunculan untuk ancang-ancang merebut kue rekonstruksi daerah bencana

itu, berlindung di balik jubah kedermawanan (filantropi).

Konglomerat yang paling dulu cepat bergerak menawarkan jasa perencanaan tata ruang dan sekaligus konstruksi, adalah kelompok Artha Graha, berlindung di balik spanduk-spanduk Yayasan Artha Graha. Spanduk-spanduk yayasan itu tampak hampir merata di semua kecamatan di tujuh kabupaten yang paling parah dilanda gempa dan tsunami. Sampai bulan Maret 2005, posko Artha Graha ini juga yang paling ramai dikunjungi orang, karena mereka sering mendatangkan artis-artis terkenal dari Jakarta.

Kelompok ini sebagian milik sebuah yayasan militer, yakni Yayasan Kartika Eka Paksi. Yayasan terbesar milik TNI/Angkatan Darat ini memiliki 20% saham Bank Artha Graha. Konglomerat ini sudah masuk ke Aceh untuk mengidentifikasi perbagai peluang bisnisnya melalui *Satuan Tugas Artha Graha Peduli Aceh*, segera setelah gelombang tsunami menghantam Aceh dan Nias, 26 Desember lalu.

Tidak lama kemudian, konglomerat yang dipimpin oleh pengusaha muda, Tomy Winata, sudah siap menawarkan cetak biru buat rekonstruksi kota Meulaboh dan *hinterland* nya di Kabupaten Aceh Barat. Namun setelah berita ini dilansir oleh beberapa media cetak, antara lain

Koran Tempo, 28 Januari 2005, kelompok Artha Graha menyatakan mereka akan mengundurkan diri dari Meulaboh (lihat *Tempo*, 13 Februari 2005: 108-12). Namun dari pengamatan sumber-sumber penulis di Medan dan Aceh, kelompok Artha Graha masih cukup menonjol kehadirannya di Aceh, dan peluang-peluang bisnis infrastruktur masih sangat terbuka bagi mereka.

Strategi pendekatan Artha Graha ke Aceh dan Nias memang sangat unik. Yang langsung memimpin Satuan Tugas Artha Graha Peduli Aceh adalah Kiki Syahnakri. Jenderal Purnawirawan itu sehari-hari adalah komisiaris bank yang menjadi sumber dana banyak kegiatan anak-anak perusahaan Artha Graha Group itu, berdasarkan surat pengangkatan KSAD. Dengan demikian, tidak mustahil bahwa pendekatannya ke Aceh Besar melibatkan perwira-perwira TNI / AD yang sedang bertugas di Aceh, pasca tsunami. Termasuk Komandan Korem Liliwangi, Kol. (Inf.) Geerhan Lantara, seorang veteran perang di Timor Leste, seperti halnya Kiki Syahnakri sendiri.

Dengan banyaknya tentara yang bertugas di Aceh, pasca tsunami boleh dikata pekerjaan *land clearing* sudah dilakukan oleh tentara – dengan dibayar dari uang rakyat Indonesia – bagi proyek-proyek yang bakal dibangun kelompok Artha Graha. Penyebaran tentara ke nyaris

seluruh daratan Aceh, pasca tsunami, juga merupakan pencegahan (*deterrent*) bagi rakyat Aceh yang bermaksud menolak *modus operandi* bisnis militer di bawah payung Artha Graha.

Hubungan Tomy Winata sebagai *boss* Artha Graha ke tentara sekaligus melicinkan jalan baginya untuk mendapatkan dukungan Presiden SBY. Soalnya, selain Kiki Syahnakri, ada seorang mantan jenderal yang lebih dekat lagi ke Tomy Winata, dan sekaligus dekat ke SBY. Itulah Letjen (Purn.) T.B. Silalahi, yang dikalangan bisnis dianggap sebagai “bapak angkat” Tomy Winata, dan sehari-hari memimpin bagian Pengembangan Masyarakat Kelompok Artha Graha. Jenderal yang berdarah Batak ini, dimasa kampanye kepresidenan SBY di Sumatera Utara, dimana ditengarai ia memberikan sumbangan satu miliar rupiah kepada Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), gereja Protestan terbesar di provinsi itu, bahkan Indonesia dan Asia Tenggara (*Swara Berita*, Edisi Minggu 1/8).

Setelah berhasil merebut kursi kepresidenan, TB Silalahi tetap menjadi orang kepercayaan Presiden SBY. Untuk mamatau penanganan kegiatan pasca tsunami di Nias, TB Silalahi yang diutus sebagai Penasehat Khususnya (*Berita Oikumene*, Juli 2005: 16, 18).

Sesungguhnya, sejumlah konglomerat lain juga telah bermunculan di Aceh, berawal dari kepedulian sosial yang dibungkus baju yayasan atau organisasi sosial lain. Misalnya Kelompok Astra (yang memberikan bantuan paling besar, yakni Rp 39,9 miliar) dan kelompok Bakrie (yang memberikan bantuan 10 miliar). Kedua perusahaan ini berkepentingan untuk membantu rakyat Aceh, kerana memiliki usaha perkebunan kelapa sawit di Aceh. Kelompok Bakrie, melalui PT Bakrie Sumatra Plantations yang beroperasi di Aceh Timur. Sementara kelompok Astra, melalui PT Astra Agro Lestari, sejak 1994 beroperasi di Aceh Barat dan Singkil melalui PT Karya Tanah Subur dan PT PT Perkebunan Lembah Bhakti (*Prospektif*, 10-16 Januari 2005: 17).

Kelompok Medco pimpinan Arifin Panigro, yang juga menyumbang Rp 10 miliar untuk membantu penanggulangan bencana seperti halnya kelompok Bakrie, juga punya kepentingan bisnis di Tanah Rencong. Akhir tahun lalu, Medco resmi mengakuisisi 70 % hak ladang minyak Langsa Technical Assistance Contract (TAC) melalui Medco Moeco Langsa Ltd, perusahaan patungan *fifty-fifty* antara PT Medco Energi Internasional Tbk. Dan Mitsui Oil Exploration Co. Ltd. Hasilnya lumayan juga. Blok langsa itu berhasil diaktifkan kembali, dengan tingkat

produksi yang sudah di tes sebesar 4.500 barrel minyak per hari (*Warta Ekonomi*, 21 Februari 2005: 21; *Kompas*, 3 Mei 2005).

Sejumlah pengusaha keturunan Tionghoa menyalurkan bantuan mereka melalui badan atau organisasi keagamaan yang lain. Kelompok CCM menyalurkan melalui WALUBI, wadah persatuan umat Buddha Indonesia yang direstui oleh pemerintah. Kebetulan, ketua WALUBU, Siti Hartati Murdaya adalah juga pimpinan kelompok CCM. Lalu, Yayasan Tzu Chi Indonesia yang berasal dari Taiwan, yang menyalurkan bantuan dari beberapa kelompok bisnis ke Aceh. Misalnya, bantuan Rp 1 Miliar dari PT Indofood Sukese Makmur Tbk, bantuan dana dan relawan tenaga medis dari kelompok Gajah Tunggal, serta sejumlah posko bantuan dari kelompok Artha Graha (*Prospektif*, 10-16 Januari 2005: 9, 15, 32-33).

Maklumlah, kegiatan sosial lembaga ini didukung oleh sejumlah pengusaha keturunan Tionghoa yang sudah sukses berbisnis di Indonesia. Antara lain, Eka Tjipta Widjaja (kelompok Sinar Mas) dan Sugianto Kusuma (kelompok Artha Graha) dari generasi tua sampai dengan Franky Widjaja (Sinar Mas) dan Tomy Winata (Artha Graha) dari generasi muda (*prospektif*, 14-20 Februari 2005:9-31).

Berkat sumbangan para anggota dan simpatisan, Tzu Chi telah memberikan

bantuan 30 ribu ton beras selama setahun untuk seluruh Aceh, serta membangun 1.200 rumah tenda untuk Meulaboh dan 2.500 buah untuk Banda Aceh. Menurut rencana, Tzu Chi juga akan membangun 3000 rumah permanen, 2000 buah untu di Banda Aceh dan 1000 buah di Meulaboh. Sedangkan pengungsi Aceh yang akan pulang dari Medan dan Jakarta, akan dibantu dengann dana antara Rp 300 ribu s/d Rp 500 ribu. Begitu menurut Sugianto Kusuma, wakil Ketua Umum Yayasan Tzu Chi Indonesia, yang juga komisiaris Kelompok Artha Graha (*Prospektif*, 14-20 Februari 2005: 26-7).

Namun masih banyak kegiatan rekontruksi infrastruktur besar yang jatuh ke perusahaan lain. Misalnya, pembangunan pelabuhan di Krueng raya, Kabupaten Aceh Besar, yang jatuh ke tangan kelompok Bukaka, milik keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sedangkan pembangunan bandar udara di Aceh jatuh

ke tangan maskapai asing yang sudah membangun beberapa bandara di Indonesia, yakni Schiphol Airport. TNC (*transnational corperation*) dari Belanda ini disertai membangun bandara Manado dan Ambon, dua bandara provinsi termegah setelah Batam.

Anehnya, yang kurang terdengar adalah peranan pengusaha top asal Aceh, selain Surya Paloh, dalam tahap-tahap rehabilitasi dan rekntruksi Aceh. Mana Ibrahim Risyad satu dari “empat serangkai” (*gang of four*) pemilik kelompok Salim, yang membeli saham perusahaan perkebunan raksasa, PT London Sumatera? Mana Ibrahim Hassan, teknokrat BAPPENAS pendiri Aceh Development Board (ADB) dan pemilik Hasfarm Group? Mana Bustanil Arifin, yang membantu Soeharto menyita asset-aset milik dua pengusaha Aceh, Aslam dan Karkam, yang dikonsolidasi di bawah payung PT Berdikari?

Tabel 1: Bantuan Kemanusiaan untuk dari Beberapa Perusahaan Swasta

No	Nama Perusahaan	Jumlah Bantuan (milyar rupiah)
1	Kelompok Media Indonesia (lewat program 'Indonesia Menangis' di Metro TV)	99,6
2	Kelompok Astra	39,3
3	Kelompok Artha Graha	20
4	Kelompok Bakrie	10
5	PT Medco Energy Internasional	10
6	PT Freeport Indonesia	5
7	Newmont Mining Corporation	5
8	PT Indofood Sukses Makmur	4,7
9	PT Samsung Elektronik Indonesia	3
10	Probosutejo (melalui Hotel Le Meredien & Kel. Kedaung, lewat Metro TV)	3
11	PT Indomobil Sukses	2,5
12	PT HM Sampoerna	2
13	PT Manulife	1,6
14	Kelompok Hitachi Machinery	1,4
15	PT Indocement Tunggul Perkasa	1
16	Kel. Gajah Tunggul	1
17	PT Panasonic Gobel (melalui Metro TV dan Kadin Indonesia)	1
18	Bintang Toedjoe (produsen Extras Joss)	1

Sumber: Prospektif, 10-16 Januari 2005.

Tabel 2: Bantuan Kemanusiaan Untuk Aceh dari BUMN

No	Nama Perusahaan	Jumlah Bantuan (milyar rupiah)
1	Posko BUMN peduli	73
2	Pertamina	15
3	Bank Mandiri	6,6
4	PT Tambang Batubara Bukit Asam	1,150
5	Jamsostek	1
6	PT Telkom	1

Sumber: ibid.

Apa yang telah mereka sumbangkan untuk meringankan penderitaan saudara-saudara mereka di Aceh? Bukan hanya sumbangan dana, bahan pangan, dan obat-obatan, tapi juga sumbangan pemikiran sehingga arah pembangunan kembali Aceh tidak sekedar mengikuti kemauan Paman Sam dan Paman-paman lain yang berkulit putih dan berkulit kuning?

Sejak Sabtu, 2 Mei lalu, semua kesemawarutan rekonstruksi pasca-tsunami di Aceh akan diatasi dengan mengelolanya di bawah Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias, yang lebih populer dengan singkatan "BRR". Lembaga itu dikepalai oleh Koentoro Mangkusbroto (58 tahun), yang oleh Presiden SBY dianggap punya integritas tinggi (*Tempo*, 8 Mei 2005:20). Sukses Koentoro membenahi usaha-usaha rekonstruksi Aceh dan Nias, masih harus dipertanyakan. Pengalamannya terutama di bidang pertambangan, karena ia pernah menjadi sebagai Direktur Utama PT Tambang Batubara Bukit Asam, lalu tahun 1991 diangkat menjadi Dirut PT Timah, lalu sejak 1994 diangkat menjadi Dirjen Pertambangan Umum (*Panji Masyarakat*, 14 Oktober 1998: 20-1). Menyadari hal itu, dan juga besarnya niat maskapai-maskapai tambang domestik dan asing –

Freeport Newmont, Medco, Pertamina dan Tambang Batu Bara Bukit Asam – membantu rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, justru kemungkinan *bias* koentoro Mangkudibroto harus dipertanyakan.

Apalagi kalau perjuangan Dutch Philips, maskapai transnasional Belanda yang ingin mendapat konsesi pertambangan emas di daerah Blang Pidie, dengan meminta bantuan *lobbying* oleh Presiden AS, George M. Bush, Jr., seperti yang akan dijelaskan berikut ini, menjadi kenyataan. Bantuan *lobbying* tingkat tinggi itu memang sangat dibutuhkan oleh Dutch Philips, mengingat daerah yang kaya bijih emas itu sangat ditaksir oleh Tomy Winata dan kelompok Artha Grahanya. Sedangkan Artha Graha punya seorang eksekutif yang sangat dekat dengan Presiden SBY, yakni Mayjen (Purn.) T.B. Silalahi.

C. Korupsi Transnasional

Kendati tidak diliputi oleh media nasional ada satu maskapai transnasional dari Belanda, Dutch Philips, yang berusaha mendapatkan konsesi tambang emas untuk hasil eksplorasi mereka di Bland Pidie, sebelah timur Meulaboh. Daerah itu sebelumnya merupakan basis gerilayawan GAM, namun sebelum perjanjian damai antara GAM dan pemerintah RI di Helsinki, sudah dikategorikan sebagai "daerah putih" alias sudah dikuasai

sepenuhnya oleh TNI. Untuk memastikan bahwa perusahaan Belanda itu akan mendapat konsensi tambang itu, Dutch Philips melobi Presiden AS George Walker Bush, Jr. Untuk memperjuangkannya ke koleganya dari Indonesia, Susilo Bambang Yudhyono (SBY).

Walaupun daerah Blang Pidie itu juga ditaksir oleh Artha Graha, Kans Dutch Philips masih cukup besar untuk menguasai deposit emas di situ. Soalnya SBY sangat menilai tinggi sikap pemerintah AS terhadap Indonesia. Buktinya, dalam waktu setahun kepresidenannya, ia sudah dua kali berkunjung ke gedung putih.

Perhatian George Bush Jr. pribadi bagi oara korban tsunami di Aceh dan kawasan Asia lain, memang cukup besar. Awal januari yang lalu, presiden yang ditaksir punya kekayaan sekitar 13 juta dolas AS itu merogoh koceh pribadinya dengan menulis cek sebesar 10 ribu dolar AS buat para korban tsunami di Asia. Sedangkan pemerintahnya, memberikan sumbangan sebesar 350 juta dolar AS untuk negara-negara Asia yang dilanda tsunami. Tidak Cuma itu. Pemerintah AS akan mencabut embargo suku cadang (*spare parts*) untuk pesawat Hercules C-130H milik TNI, untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi daerah yang terkena bencana di Indonesia

(*Nuansa Pos*, 7 Januari 2005). Dalam membantu tanggap darurat (*emergency responce*) di Aceh, bantuan AS memang sangat berarti. Tapi jangan lupa, bantuan pemerintah AS itu merupakan selubung dari kepentingan bisnis di AS. Apalagi, pemeo Amerika yang terkenal berbunyi "*there is no such thing like a free kunch*" (tidak ada makan siang gratis).

Kepentingan bisnis AS minimal berwujud pemantua sumber daya alam di daratan dan perairan Aceh dan Sumatera Utara lewat penginderaan satelit. Ini dugaan seorang pekerja kemanusiaan di Nias yang mempertanyakan fungsi alat-alat komunikasi satelit di atas kapal rumah sakit terapung milik Angkatan Laut AS, yang belabuh di lepas pantai Nias. Sementara untuk membantu tanggap darurat di Aceh sendiri, AS mengirim salah satu kapal Armada Ketujuh, USS *Abraham Lincoln*, yang kebetulan sedang bersandar di pelabuhan Hongkong. Kapal induk yang tiba di pelabuhan Sabang dan bersdandar di dermaga Malahayati, tanggal 1 Januari yang lalu dilengkapi selusin pesawat helikopter SH 60 *Seahawk* ke perairan Aceh. Belum lagi kapal pendarat dari USS *Bonhomme Richard* yang beroperasi di Meulaboh (*cimmando*, No. 4/Th. I, Januari-Februari 2005:86-8; *Info Baru*, 3 Januari 2005; *Radar Sulteng*, 31 Januari 2005).

Tentu saja, kepentingan AS di ujung barat Nusantara ini tidak terbatas pada penginderaan jarak jauh terhadap sumber-sumber daya alam di perairan utara Pulau Sumatera. Pengamanan jalur tanker melintasi Selat utama. AS juga sedang mencari alternatif pengganti pangkalan militer AS yang tadinya di Subic, Filipina, serta pertambangan emas di Pegunungan Leuser (*Buletin Al-Islam*, edisi 240). Kepentingan lain adalah pemasokan bahan bakar minyak (BBM) Selat Malaka, sebagai pelengkap depot BBM Armada Ketujuh di Singapura. Untuk itu, perlu pengamanan produksi minyak dan gas bumi di Aceh, yang praktis dimonopoli oleh maskapai migas AS, ExxonMobil.

AS dan sekutu-sekutunya boleh jadi juga akan berusaha dijadikan Aceh sebagai daerah alternatif penghasil produk-produk petrokimia. Ini untuk menjaga kemungkinan, apabila ekspansi industri petrokimia di Singapura sudah menabrak tembok pengadaan lahan di republik pulau itu, serta di Johor, negara bagian Malaysia yang terdekat. Sebab segitiga SIJORI (Singapura, Johor, Riau), sudah lebih dikuasai oleh ChevronTexaco dan ConocoPhilips, dua raksasa migas AS yang merupakan pesaing ExxonMobil, dan pelengkap kepentingan swasembada bahan bakar fosil (*fossil fuels*) Amerika Serikat.

Selain Amerika Serikat dan Negeri Belanda, maskapai-maskapai transnasional dari Finlandia – tempat perjanjian damai berlangsung – dan dari Swedia – yang sejian lama memberikan suaka politik kepada Hasan di Tiro dan sejumlah pimpinan GAM – juga berpotensi memetik keuangan dari kue rekonstruksi Nangroe Aceh Darussalam. Tabloid dwi-mingguan *Intelijen* edisi 29 Juli- 11 Agustus yang lalu menengarai bahwa dua perusahaan raksasa dibidang telekomunikasi, yakin *Nokia* sebagai imbalan bagi Finlandia, karena telah memfasilitasi perundingan damai antara GAM dan Pemerintah RI. Sedangkan order buat selam ini “melindungi” para pemimpin GAM. Spekulasi ini dikemukakan oleh tabloid *Intelijen* berdasarkan fakta bahwa Menteri Komunikasi dan Informasi, Sofyan Djalil – yang memiliki kewenangan regulasi sektor telekomunikasi – duduk dalam tim perunding dari pihak pemerintah Indonesia.

Sebaliknya, tabloid *Intelijen* dalam edisi yang sama juga mengarai, bahwa pemimpin GAM, Hasan Tiro, bersedia menurunkan tuntutananya dari kemerdekaan menjadi otonomi khusus buat Aceh, dengan imbalan berupa konsesi perkebunan kelapa sawit di Aceh. Menurut sumber *Intelijen*, selepas tsunami spelukan-spelukan tanah berkeliaran di Aceh, membeli tanah-tanah yang telah

dilanda tsunami untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit buat Hasan tiro. Melunaknya sikap politik Hasan Tiro itu akibat pendekatan yang sudah dilakukan Jusuf Kalla dengan Hassan Tiro, sejak sebelum Kalla menjadi Wakil Presiden.

Tentang “sogokan” kepada pemimpin perjuangan kemerdekaan Aceh berupa janji konsensi perkebunan kelapa sawit, belum dapat penulis verifikasi. Berbeda halnya tentang kemungkinan Nokia dan Ericsson mendapatkan bagian dari proyek pembangunan kembali sistem telekomunikasi di Aceh. Saat ini, Ericsson menjadi satu diantara sepuluh penyumbang peralatan telekomunikasi ke Aceh. Selanjutnya, Ericsson hanya memiliki satu pesaing saja **dalam pembangunan BTS** (*base transceiver station*) di Aceh, yakni Motorola (lihat Basuki 2005: 180-3, 191). Sehingga Kans Ericsson jaringan telekomunikasi Aceh, memang cukup besar.

Informasi lain yang penulis terima adalah bahwa ada perusahaan asal Finlandia yang ingin terlibat dalam pembanungan infrastruktur di Papua Barat. Bidang ini, sangat dekat dengan minat dan kepentingan pribadi Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang keluarganya menguasai tiga konglomerat nasional yang bergerak di bidang pembanungan jalan raya dan laut, serta keagenan mobbil Toyota, Mitsubishi, dan Kia. Ketiga konglomerat itu adalah

Hadji Kalla Group, Bukaka group, dan Bosowa Group (lihat Aditjondro 2005a).

Sementara itu, maskapai-maskapai Finlandia di bidang farmasi dan pembanungan rumah sakit pun ditenggarai akan segera terjun ke Aceh, atau daerah Indonesia lain. Namun perusahaan-perusahaan asal Finlandia yang sudah paling sering berkibar benderanya di Indonesia adalah di bidang pengolahan hasil-hasil hutan, seringkali ditunjang oleh lembaga-lembaga keuangan pemerintah Finlandia, FINNIDA, Finnish Export Credit (Finnerec). Jaako poyry adalah konsultan pabrik kertas Gowa di Sulawesi Selatan. Perusahaan Finlandia itu juga konsultan pabrik kertas rokok PT Surya Zigzaf di Jawa Timur, yang merupakan kongsi antara pabrik rokok kretek Gudang Garam dan Probosutedjo, adik tiri Soeharto. Selanjutnya perusahaan Finlandia itu menjadi konsultan pabrik pabrik kertas dan *pulp* PT Indah Kita Riau, ikut merencanakan perencanaan perkebunan ekaliptus dan pabrik *pulp* PT Astra Scott Cellulosa yang dibatalkan di Papua Barat (lihat Down to Earth 1991: 10-11, 25, 32,35-6).

Jaakko Poyry juga terlibat dalam kampanye pengolahan hutan gambut di Kalimantan Tengah, yang didukung oleh Kedubes Finlandia di Jakarta dan Finish Foreign Trade Association. Enso Gutziet telah dikontrak oleh PT Prima Indopot

Lestari, dan berkongsi dengan Inhutani di Kalimantan Barat. Rauma Repola, telah melakukan survei untuk pembangunan pabrik kertas dan pulp PT Furuma Utama Timber Co. di Papua Barat. Disponsori oleh FINNIDA, Rauma Repola juga menyediakan peralatan pencucian dan pemutihan bubur kertas PT Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara. FINNEREC merencanakan berkongsi dengan harian *Sinar Harapan* untuk membangun pabrik kertas koran PT Sinar Finn Newsprint di Cirebon (lihat *Down to Earth* 1991:10-11, 25, 32, 35-6).

Makanya secara obyektif, tidak tertutup kemungkinan bahwa maskapai-maskapai Finlandia itu akan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan perusak hutan di Aceh seperti PT Kertas Kraft Aceh (KKA), milik Bob Hasan dan putera sulung Soeharto, Sigit Harjojudanto (*Down to Earth* 1991:31).

Quo Vadis, Nasionalisme Aceh?

Sementara itu, bagaimana dengan kepentingan, kesejahteraan, dan hak-hak rakyat Aceh sendiri? Dengan munculnya suatu piramida atau starfikasi ekonomi, dengan kepentingan maskapai-maskapai pertambangan asing di puncak piramida, kepentingan maskapai-maskapai asing lainnya di lapis kedua, kepentingan maskapai-maskapai domestik nasional termasuk kepentingan pengusaha asal

Aceh yang sudah berkiprah di lapis berikutnya selanjutnya kepentingan UKM (usaha kecil menengah) yang asli Aceh, maka kepentingan rakyat Aceh di akar rumput dengan mudah dapat dikorbankan. Terutama mereka yang terancam kehilangan pengakuan hak atas tanah merdeka, akibat hancur atau hilangnya surat-surat tanah mereka oleh tsunami yang lalu.

Selain itu, rakyat Aceh di *gampong-gampong*, yang biasa berdiskusi di *meunasah-meunasah*, selepas sholat jumat atau sholat magrib, juga harus bersiap-siap menghadapi gelombang tsunami baru, yang tidak kalah dahsyatnya dengan tsunami 26 Desember lalu. Yakni, arus ekonomi, sosial, dan budaya yang baru, yang akan mengulung-gulung membanjiri Serambi Mekkah, bersama para investor yang kepentingannya akan dibela mati-matian oleh aparat bersenjata Indonesia, yang sebentar lagi akan kembali dipersenjatai dan dilatih oleh tentara dan industri perang AS, setelah rehabilitasi kerjasama militer Indonesia dan AS, pasca pertemuan antara SBY dan George W. Bush, Jr di Gedung Putih, Rabu sore, 25 Mei lalu.

Kemudian, seperti ironi yang digambarkan oleh Graham Hancock (2005), bagaimana “dewa-dewa” pencipta kemiskinan menjadi kaya raya atas nama kemiskinan penduduk dunia ketiga, besar

kemungkinan Aceh akan kembali mengulangi ironi itu. Sederetan lembaga PBB dan organisasi kemanusiaan internasional, dengan ratusan konsultan mereka, kini berhamburan ke Aceh, menikmati gaji tinggi dan fasilitas mereka yang begitu mewah, di atas penderitaan rakyat Aceh.

Suasana serupa itu penulis saksikan di Timor Leste, setelah tentara PBB di bawah komando seorang jenderal dari Australia berhasil mengusir tentara Indonesia dan tanah jajahannya itu. Namun setelah itu bahkan tukang kayu dan tukang batu pun didatangkan oleh perusahaan-perusahaan Australia, yang mendapat kontrak untuk rekonstruksi Timor Leste. Sementara lowongan pekerjaan yang terisisa buat orang Timor asli, tinggal menjadi satpam, sopir, dan yang sedikit lebih tinggi pendidikannya, penterjemah. Apakah itu yang akan – atau – sedang dialami oleh orang Aceh juga?

Semoga nasib orang Aceh tidak demikian semoga saja, para perencana dan pelaksana pembangunan di Aceh, yang telah mengalami atau menyaksikan dahsyatnya dampak gempa dan tsunami yang lalu, dapat belajar dari kisah-kisah sedih yang dibeberkan Graham Hancock di akhir daswarsa 1980-an dan sudah diramalkan oleh Frantz Fanon tiga dasawarsa sebelumnya.

Kalau itu yang terjadi, maka tidak mustahil satu gelombang nasionalisme baru akan melanda Tanah Rencong. Nasionalisme Aceh yang brau, yang bukan lagi disuarakan oleh generasi tua yang berjuang dengan senjata hasil korupsi tentara, tetapi disuarakan oleh generasi muda yang berjuang dengan mulut dan komputer, lewat jaringan ornop HAM sedunia.

Palu, 19 September 2005.

Kepustakaan

- Aditjondro, George Junus (1998) *Dari Soeharto ke Habibie: Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari: Kedua Puncak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Rezim Orde Baru*. Jakarta: MIK & Pijar Indonesia
- _____ (2001), *“Menanam Palma di Ladang Ganja, Dipupuk Darah dan Air Mata” Kata Pengantar Untuk Otto Syamsuddin Ishak, Dari Maaf ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa Sosiologi-Politik*. Jilid 2. Jakarta & Banda Aceh: YAPPIKA, LSPP & Cordova hal. xii-xxx.

- _____ (2004a). *Membedah Kembar Siam Penguasa Politik & Ekonomi Indonesia: Metodologi Investigasi Korupsi Sistematis Bagi Aktivis dan Wartawan*. Jakarta: Lembaga Studi Pers & Pembanugunan (LSSP).
- _____ (2004b). *Timor Leste, Fotokopi Indonesia? Catatan Perjalanan ke Timor Leste, 15 s/d 25 Mei 2004*. Naskah yang belum diterbitkan.
- _____ (2005a). *Setelah Gemuruh Wera Sulawena Dibungkam: Dampak Pembangunan PLTA Poso dan Jaringan SUTETnya*. Position Paper Yayasan Tanah Merdeka, Palu.
- _____ (2005b). *Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tuga , Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa*. Yogyakarta: LkiS
- Basuki, Dian R. (peny.) (2005). *Bangkit dari Puing-Puing Gempa dan Tsunami: Pemulihan Telekomunikasi di Nangroe Aceh Darussalam*. Jakarta: PT Telkom Tbk. dan Pusat Data & Analisa TEMPO.
- Billah, M. M. (2004). “Pangkal Konflik: Ketidakadilan Pengolahan Sumber Daya Alam”. Dalam Yaphi (peny). *Bara Api di Serambi Mekkah*. Surakarta: Yayasan Pengabdian Hukum Indonesia (Yaphi), hal. 136-47.
- Down to Earth (1991). *Pulping the Rainforest: The Rise of Indonesia’s Paper and Pulp Industry*. London: Down to Earth, International Campaign for Ecological Justice in Indonesia.
- Fanon, Frantz (1971). *The wretched of the Earth*. Middlesex, U.K.: Penguin Books pertama kali diterbitkan dalam bahasa Perancis tahun 1961. Khususnya Bab 3: ‘Pitfalls of National Consciousness’.
- Hancock, Graham (2005). “Dewa-Dewa” *Penciptaan Kemiskinan: Kekuasaan, Prestise, dan Korupsi Bisnis Bantuan Internasional*. Diterjemahkan oleh Yos Suprpto. Yogyakarta: Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Ishak, Otto Syamsuddin (2004). “Ganja Aceh dan Serdadu Indonesia dalam Periode Perang Aceh 1989-2203”. Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, No. 17/Th. III, hal 61-82.
- Kell, Tim (1995). *The Roots of Acehnese Rebellion, 1989-1992*. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project.
- SAMAK (2003). *50 Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Gubernur NAD Abdullah Puteh*. Banda Aceh.